

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

2018

LAPORAN KEUANGAN

AUDITED

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR

PER 31 Desember 2018

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementrerian Komunikasi dan Informatika yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, Februari 2018 Dirjen Aplikasi Informatika

Semuel Abrijani Pangerapan

DAFTAR ISI

Kat	a Pengantar	i
Daf	tar Isi	ii
Per	nyataan Tanggung Jawab	iii
Rin	gkasan	1-2
I.	Laporan Realisasi Anggaran	3
II.	Neraca	4
III.	Laporan Operasional	5
IV.	Laporan Perubahan Ekuitas	6
V.	Catatan atas Laporan Keuangan	
	A. Penjelasan Umum	7-16
	B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	17-23
	C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	24-33
	D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	34-41
	E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	42-46
	F. Pengungkapan Penting Lainnya	47-50
VI.	Lampiran dan Daftar	

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA

GEDUNG KEMENKOMINFO, JL.MEDAN MERDEKA BARAT NO. 9 JAKARTA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksana Anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerentihan.

Jakarta, Februari 2018 Dirjen Aplikasi Informatika

Semuel Abrijani Pangerapan

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.2.603.796.900. Realisasi Belanja Negara pada Semester II TA 2018 adalah sebesar Rp. 138.608.294.417 atau mencapai 96,28 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 143.971.236.000

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2018. Nilai Aset per 31 Desember 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp.132.494.682.560 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.585.390.6632; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 82.301.826.130; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp.49.607.465.767.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 13.994.839 dan Rp.132.480.687.721

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.1.174.202.916, sedangkan jumlah beban Operasional adalah sebesar Rp.195.125.485.362 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp.193.951.282.446. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp.1.240.073.743 dan Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp.192.711.208.703

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp.191.742.332.810 ditambah Defisit-LO sebesar Rp. 192.711.208.703 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp.3.561.633.959 dan transaksi antarentitas senilai Rp.137.011.197.573 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp.132.480.687.721

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2018 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	SEM II TA 2018		% thd Angg	TA 2017
UNAIAN	CATATAN	ANGGARAN	REALISASI	% tilu Aligg	REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1		1.280.355.176		1.280.355.176
JUMLAH PENDAPATAN			1.280.355.176		1.280.355.176
BELANJA	B.2.				
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.3	26.245.803.000	25.495.634.706	97,14	27.824.472.430
Belanja Barang	B.4	112.811.142.000	108.519.055.640	96,20	110.033.685.045
Belanja Modal	B.5	4.914.291.000	4.593.604.071	93,47	187.137.568.013
Hibah	B.6				
JUMLAH BELANJA		143.971.236.000	138.608.294.417	96,27	324.995.725.488

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA NERACA

PER 31 Desember 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	SEM II 2017	2016
ASET		V=111 11 =V=2	
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	81.036.147	
Piutang PNBP	C.4	264.517.985	
Penyisihan piutang PNBP		(1.322.590)	
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	1.600.000	3.900.000
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	(800.000)	(1.950.000)
Belanja Dibayar di Muka	C.8	9.091.031	76.754.887.214
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	231.268.090	68.568.000
Jumlah Aset Lancar		585.390.663	76.825.405.214
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	
Jumlah Piutang Jangka Panjang		•	•
ASET TETAP			
Tanah	C.14		
Peralatan dan Mesin	C.14 C.15	184.983.951.529	172.985.834.936
Gedung dan Bangunan	C.15	104.303.331.323	172.303.034.330
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.10 C.17		
Aset Tetap Lainnya	C.17	1.030.226.886	885.711.886
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.18	1.030.220.000	003.711.000
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.19	(103.712.352.285)	(62.356.272.729)
Jumlah Aset Tetap	C.20	82.301.826.130	111.515.274.093
·		02/301/020/130	111.010.127 11.000
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.21	63.482.660.346	7.951.827.885
Aset Lain-Lain	C.22	-	2.268.554.827
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	(13.875.194.579)	(3.851.136.795)
Jumlah Aset Lainnya		49.607.465.767	6.369.245.917
JUMLAH ASET		132.494.682.560	194.709.925.224
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	13.994.839	1.542.690
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek			1.542.690
JUMLAH KEWAJIBAN		13.994.839	1.542.690
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	132.480.687.721	191.742.332.810
JUMLAH EKUITAS		132.480.687.721	191.742.332.810
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		132.494.682.560	191.743.875.500

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2018 DAN 2017

URAIAN	CATATAN	SEM II 2018	2017
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.174.202.916	790.975.286
JUMLAH PENDAPATAN		1.174.202.916	790.975.286
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	25.498.995.824	25.695.805.114
Beban Persediaan	D.3	1.971.673.260	2.377.543.758
Beban Barang dan Jasa	D.4	80.341.533.990	69.311.854.996
Beban Pemeliharaan	D.5	1.847.306.720	1.574.247.249
Beban Perjalanan Dinas	D.6	40.875.859.548	37.546.140.420
Beban Barang untuk Diserahkan	D.7	1.724.537.800	1.886.696.400
kanada Maswarakat	D.8		
Beban Bantuan Sosial Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	42.866.174.836	23.745.803.243
Beban Penvisihan Piutang Tak	D.10	(596.616)	(350.000)
JUMLAH BEBAN		195.125.485.362	162.137.741.180
SURPLUS (DEFISIT) DARI			
KEGIATAN OPERASIONAL		(193.951.282.446)	(161.346.765.894)
	5.44		
REGIATAN NON OPERASIONAL Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.11	19.500.000	94.000.000
Defisit Pelepasan Aset Non Lancar		13.300.000	(1.769.010.276)
Defisit Selisih Kurs		-	, , ,
Pendapatan dari Kegiatan Non			39.188.090
Operasional Lainnya		1.240.901.643	33.186.838
Beban dari Kegiatan Non			(49.782)
Operasional Lainnya		(20.327.900)	
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN			
NON OPERASIONAL		1.220.573.743	(1.635.871.968)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR	BIASA	1.240.073.743	(162.982.637.862)
DOCUMAD DIACA	D 13		
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP			
Beban Perjalanan Dinas			
Beban Persediaan SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR B	1 4 5 4		
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR B	IASA 	(192.711.208.703)	(162 092 627 962)
SURPLUS/DEFISIT LU		(192./11.208./03)	(162.982.637.862)

I. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2018 DAN 2017

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	SEM II 2018	2017
EKUITAS AWAL	E.1	191.742.332.810	200.971.583.878
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(192.711.208.703)	(313.022.930.787)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI	E.3		
EKUITAS	E.3	(3.561.633.959)	
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3.1		-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	967.973.900
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUA	E.3.5	-	(5.481.221.678)
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	
JUMLAH			(4.513.247.778)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	137.011.197.573	155.676.886.101
KENAIKAN/PENURUNAN ENTITAS	E.5	(59.261.645.089)	
EKUITAS AKHIR	E.6	132.480.687.721	39.112.291.414

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika

Dasar Hukum

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika mempunyai tugas

Entitas dan

dan fungsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor: 54

Rencana

Tahun 2017 tentang Kementerian Komunikasi dan

Strategis

Informatika, pada:

Pasal 14:

- 1. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- 2. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dipimpin oleh Direktur Jenderal.

Pasal 15:

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika mempunyai tugas : Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan aplikasi informatika.

Pasal 16

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang penatakelolaan e-Government, e-Business, dan keamanan informasi, peningkatan teknologi dan infrastruktur aplikasi informatika serta pemberdayaan informatika;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang penatakelolaan e-Government, e-Business, dan keamanan informasi, peningkatan teknologi dan infrastruktur aplikasi informatika serta pemberdayaan informatika;

- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penatakelolaan e-Government;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penatakelolaan e-Government;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penatakelolaan e-Government, e-Business, dan keamanan informasi, peningkatan teknologi dan infrastruktur aplikasi

informatika serta pemberdayaan informatika;

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Basis Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.Pengukuran pos-pos laporan keuangan

menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasardasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementrerian Komunikasi dan Informatika yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas dengan bruto, yaitu membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO (2) Pendapatan-LO

 Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Kementrerian Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

- o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
- Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan yaitu azas bruto, dengan membukukan bruto, tidak penerimaan dan mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja (3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan klasifikasi menurut ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban (4) Beban

• Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban;

- terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset (5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila menenuhi kriteria sebagai berikut:
- o Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas		
Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	 Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya

apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai

sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset
 Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga dibatasi (kemitraan), dan kas yang penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2017 tentang Masa Manfaat Dalam

Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk,	10
Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

 Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(7) Kewajiban

 Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

 Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(8) Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan Negara dan Hibah		
Pendapatan Jasa		
Pendapatan Negara Bukan Pajak		
Jumlah Pendapatan	-	
Belanja		
Belanja Pegawai	26.245.803.000	26.245.803.000
Belanja Barang	112.811.142.000	112.811.142.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Belanja Modal	4.914.291.000	4.914.291.000
Jumlah Belanja	143.971.236.000	143.971.236.000

Realisasi

B.1 PENDAPATAN

Pendapatan Rp. 2.603.796.900

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp.2.603.796.900 Pendapatan lingkup Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika terdiri dari Pendapatan Negara Bukan Pajak. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut: Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Отмин	Anggaran	Realisasi	Angg.
PNBP Lainnya			
-Pendapatan dari pemindatanganan			
BMN		19.500.000	
-Pendapatan			
Sewa,Tanah,Gedung <bangunan< td=""><td></td><td>805.617</td><td></td></bangunan<>		805.617	
-Pendapatan Hak dan Perizinan		976.814.639	
-Pendapatan Tuntutan Perbendaharaan		2.300.000	
Pendapatan denda penyelesaian			
pekerjaan		196.582.660	
-Penerimaan kembali pegawai pegawai TAYL		20.103.720	
-Penerimaan kembali belanja barang TAYL		1.061.296.287	
-Penerimaan kembali belanja modal			
TAYL		326.032.977	
Penerimaan Kembali persekot		361.000	
Jumlah	-	2.603.796.900	

Realisasi Belanja

B.2. BELANJA

Rp. 138.608.294.417

Realisasi Belanja TA 2018 adalah sebesar Rp.138.608.294.417 atau 96.28% dari anggaran belanja sebesar Rp.143.971.236.000,Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2018

URAIAN	2018		
ORAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	26.245.803.000	25.495.634.706	97,14
Belanja Barang	112.811.142.000	108.519.055.640	96,2
Belanja Modal	4.914.291.000	4.593.604.071	93,47
Belanja Bantuan Sosial			
Total Belanja (NET)	143.971.236.000	138.608.294.417	96,27

Dibandingkan dengan Tahun 2017, Realisasi Belanja TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 6 persen dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain adanya penurunan PAGU Anggaran terutama

pada Belanja Modal.

Belanja

B.3 Belanja Pegawai

Pegawai Rp. 25.495.634.706

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.25.495.634.706 dan Rp. 27.824.472.430 Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja TA 2018 mengalami penurunan sebesar 1% dari TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya pegawai yang pensiun Perbandingan Belanja Pegawai TA 2018 dan 2017

9.559.807.600	10.211.268.900	(6,38)
124.934	137.249	(8,97)
703.301.460	713.931.410	(1,49)
168.168.378	166.095.382	1,25
1.020.060.000	1.085.090.000	(5,99)
128.570.000	67.790.000	89,66
41.153.080	83.238.972	(50,56)
449.510.940	484.127.700	(7,15)
1.043.620.000	1.081.587.000	(3,51)
255.630.000	271.175.000	(5,73)
40.948.700	50.398.400	
71.500.000	88.000.000	
4.094.870	9.789.840	-
12.040.631.616	13.511.842.577	
31.486.872	-	-
25.495.634.706	27.824.472.430	(8,37)
	124.934 703.301.460 168.168.378 1.020.060.000 128.570.000 41.153.080 449.510.940 1.043.620.000 255.630.000 40.948.700 71.500.000 4.094.870 12.040.631.616 31.486.872	124.934 137.249 703.301.460 713.931.410 168.168.378 166.095.382 1.020.060.000 1.085.090.000 128.570.000 67.790.000 41.153.080 83.238.972 449.510.940 484.127.700 1.043.620.000 1.081.587.000 255.630.000 271.175.000 40.948.700 50.398.400 71.500.000 88.000.000 4.094.870 9.789.840 12.040.631.616 13.511.842.577 31.486.872 -

Belanja Barang

B.4 Belanja Barang

Rp. 108.519.055.640

Realisasi Belanja Barang TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.108.519.055.640 dan Rp. 110.033.685.045.

Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami kenaikan 13

persen dari TA 2017. Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan PAGU di belanja barang Non Operasional dan persediaan konsumsi sepanjang tahun 2018.

Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan 2017

URAIAN	EALISASI SEM II TA 20 ⁻	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	11.338.849.971	4.439.254.100	155,42
Belanja Barang Non Operasional	12.458.054.291	14.961.010.410	(16,73)
Belanja persediaan	2.161.985.300	2.174.953.860	
Belanja Jasa	43.007.065.314	47.530.723.761	(9,52)
Belanja Pemeliharaan	1.905.026.050	1.494.906.094	27,43
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	32.244.694.482	34.637.142.019	(6,91)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	3.678.842.432	2.908.998.401	26,46
Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kpd ma	1.724.537.800	1.886.696.400	(8,59)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.			#DIV/0!
Jumlah Belanja	108.519.055.640	110.033.685.045	(1,38)

Belanja Modal

B.5 Belanja Modal

Rp. 4.593.604.071

Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017 adalah masingmasing sebesar Rp.4.593.604.071 dan Rp. 187.137.568.013. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2018 mengalami peningkatan yang sangat signifikan sebesar 3.318% dibandingkan TA 2017 disebabkan oleh pembelian alat DNS.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2018 dan 2017

URAIAN	REALISASI SEM II T.A. 2017	REALISASI T.A 2016	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.699.259.071	184.999.973.178	(98,54)
Belanja Modal Lainnya	1.894.345.000	2.137.594.835	
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian		-	
Jumlah Belanja	4.593.604.071	187.137.568.013	-97,55

Belanja Modal peralatan dan Mesin Rp. 2.699.259.071

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2018 adalah sebesar Rp. 2.699.259.071

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2018 dan 2017

URAIAN	
Belanja Peralatan dan mesin	2.699.259.071
JUMLAH	2.699.259.071

Belanja Modal lainnya Rp. 1.894.345.000

Modal B.5.2 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.1.894.345.000 dan Rp. 2.137.594.835. Realisasi TA 2018 mengalami penurunan dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan pagu belanja modal yang berkurang

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2018 dan 2017

URAIAN JENIS BELANJA	T.A. 2018	T.A 2017	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	1.894.345.000	21.379.594.835	
Jumlah Belanja Kotor			
Pengembalian Belanja Modal		0	
Jumlah Belanja	1.894.345.000	0	

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Persediaan

Persediaan sebesar Rp.231.268.090 Nilai Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp.231.268.090 dan Rp.68.568.000.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan TA 2018 dan 2017

JENIS	TH 2018	TH 2017
Barang Konsumsi	230.603.690	48.328.000
Barang untuk Pemeliharaan	664.400	-
Persediaan untuk Diserahkan		
kepada Masyarakat		20.240.000
Aset tetap lainnya yg diserahkan		
ke masy	-	1
Persediaan Lainnya	ı	113.300
Jumlah	231.268.090	68.681.300

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Kas diBendahara Pengeluaran Rp.0

C.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp.0.

Bagian Lancar TGR sebesar Rp.1.600.000

C.3 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp.1.600.000 dan Rp.3.900.000 .Tuntutan Ganti Rugi diakibatkan salah satu pegawai Ditjen Aplikasi Informatika kehilangan kendaraan motor dinas.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.Rincian Bagian Lancar

Tagihan TP/TGR adalah sebagai berikut: *Perbandingan Rincian Bagian Lancar TP/TGR TA 2018 dan 2017*

No	Nama	Tahun 2018	Tahun 2017
1	Bagian Lancar TGR	1.600.000	3.900.000
	Jumlah	1.600.000	3.900.000

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar Rp.800.000,-

C.4 Penyisihan Piutang Tak Tertagih -Bagian Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.800.000 dan Rp.1.950.000

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak tertagih – Piutang Lancar TA 2018

Piutang	Jk Pendek	Penyisihan	Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	-
Diragukan		50%	-
Macet		100%	-
Jumlah			-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar		0,50%	-
Kurang Lancar		10%	ı
Diragukan	1.600.000	50%	800.000
Macet		100%	-
Jumlah	1.600.000		800.000
Bagian Lancar TPA			
Lancar		0,50%	ı
Kurang Lancar		10%	1
Diragukan		50%	-
Macet		100%	ı
Jumlah			-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	1.600.000		800.000

C.5. Belanja Di Bayar di Muka

Belanja Di Bayar di Muka TA 2018 sebesar Rp.9.091.031 yang

berasal dari Tunjangan Kinerja dan Uang Makan yang dibayar penuh Bulan Desember 2018

C.6 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak TA 2018 senilai Rp.264.517.985 yang berasal dari Kelebihan Pembayaran pada kontrak DNS dan yang dibayarkan TA 2019.

Uraian	TH 2018	TH 2017
Pengembalian Jaringan Down	264.517.985	
	-	
Jumlah	264.517.985	

Peralatan dan Mesin Rp.184.983.951.52

C.6 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.184.983.951.529 dan Rp.172.985.834.936 . Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2018	176.492.194.598
Mutasi tambah:	15.059.829.567
Alat angkutan	15.000.000
Pembelian	2.692.800.591
Transfer masuk	8.885.357.986
Reklas Masuk	2.263.863.345
Reklas dari aset lainnya ke aset tetap	13.222.500
Perolehan hasil TL Normalisasi	246.082.471
Koreksi pencatatan Nilai	943.502.674
Mutasi Kurang	6.568.072.636
Penghapusan	12.190.000
Transfer keluar	2.956.758.497
Reklas Keuar	2.263.863.345
Koreksi pencatatan Nilai	1.089.178.323
Normalisasi BMN	246.082.471
Saldo per 31 Desember 2018	184.983.951.529

Aset Tetap

C.7 Aset Tetap Lainnya

Lainnya Rp 1.030.226.886

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah,peralatan dan mesin, gedung dan

bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp.1.030.226.886 dan Rp.885.711.886

Saldo per 1 Januari 2018	885.711.886
Mutasi tambah:	144.515.000
Pembelian	
Transfer Masuk	144.515.000
Mutasi kurang:	
Transfer keluar	
Saldo per 31 Desember 2018	1.030.226.886

Mutasi tambah:

 Aset Tetap Lainnya pada tahun 2018 berasal dari buku perpustakaan sebesar Rp.144.515.000
 Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp.103.712.352.285

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp.103.712.352.285 dan Rp.62.356.272.729 .

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018, sedangkan rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	184.983.951.529	103.712.352.285	81.271.599.244
4	Aset Tetap Lainnya	1.030.226.886		1.030.226.886
	Akumulasi Penyusutan	186.014.178.415	103.712.352.285	82.301.826.130

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran.

Aset Tak Berwujud Rp.63.482.660.34

C.9 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.63.482.660.346 dan Rp.7.951.827.885 . Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud TA 2018

No.	Uraian		Nilai
1	Software Komputer	Rp	8.314.272.885
2	Lisensi	Rp	54.416.737.461
3	ATB Lainnya	Rp	751.650.000
Jumlah Nilai Perolehan per 31 Desember 2018		Rp	63.482.660.346

Aset Lain-Lain

C.10 Aset Lain-Lain

Rp.0

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah Rp.0 dan Rp.2.268.554.827 . Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Awal 1 Januari 2018	Rp	2.268.554.827
Mutasi tambah:	Rp	-
	Rp	-
Mutasi Kurang	Rp	2.268.554.827
Penghapusan (BMN yang dihentikan dari pe	Rp	2.268.554.827
Saldo per 31 Desember 2018	Rp	

Mutasi kurang berasal dari:

a. Pengghapusan BMN sebesar Rp.6.255.200

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran.

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya Rp.13.875.194.579

C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutandan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.13.875.194.579 dan Rp.3.851.136.795 . Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
Α	Aset Tak Berwujud			
1	Software Komputer	8.314.272.885	5.712.683.960	2.601.588.925
2	Lisensi	54.416.737.461	8.162.510.619	46.254.226.842
3	ATB Lainnya	751.650.000		751.650.000
	Jumlah	63.482.660.346		49.607.465.767
В	Aset Lainnya			-
	Jumlah	63.482.660.346	5.712.683.960	57.769.976.386
	Total	126.965.320.692	5.712.683.960	107.377.442.153

Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp.13.994.839

C.12 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp.13.994.839 dan Rp.1.542.690 . Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Utang kepada Pihak Ketiga terdiri dari kekurangan gaji pegawai.

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada lingkup per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga

No	Uraian	Jumlah		
1	Kekurangan bayar Tunkin	Rp	8.932.271	
2	Kekurangan gaji	Rp	4.012.568	
4	kekurangan uang makan	Rp	1.050.000	
	Total	Rp	13.994.839	

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga disajikan pada lampiran.

C.13. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

Nilai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 Sebesar Rp.81.036.147.Nilai ini berasal dari pengembalian perjalanan Dinas dan Honor Narasumber TA 2018 yang dibayarkan Tahun 2019.

No	Uraian	Tanggal Bayar	Jumlah	
1	Pengembalian Perjalanan Dinas	14-Jan-19	Rp	40.909.147
2	Pengembalian Perjalanan Dinas	14-Jan-19	Rp	4.200.000
3	Pengembalian Perjalanan Dinas	15-Jan-19	Rp	1.952.000
4	Pengembalian Perjalanan Dinas	16-Jan-19	Rp	2.370.000
5	Pengembalian Perjalanan Dinas	10-Jan-19	Rp	550.000
6	Pengembalian Perjalanan Dinas	02-Feb-19	Rp	17.930.000
7	Pengembalian Perjalanan Dinas	03-Feb-19	Rp	10.950.000
8	Pengembalian Honor Narsum	10-Jan-19	Rp	1.425.000
9	Pengembalian Honor Narsum	02-Feb-19	Rp	750.000
	Total		Rp	81.036.147

Ekuitas

C.14 Ekuitas

*Rp.*132.480.687.7

Ekuitas per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masingmasing sebesar Rp.132.480.687.721 dan Rp.194.7008.382.534 . Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP Rp. 1.174.202.916

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Jumlah pendapatan dari kegiatan Non Operasional lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.1.174.202.916 dan Rp. 790.975.286. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan Rincian Pendapatan TA 2018 dan TA 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	% Naik (TURUN)
Pendapatan PNBP Lainnya			
Pendapatan Jasa			
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	805.617	805.617	-
Pendapatan Dendan keterlambatan	196.582.660	2.846.285	-
Pendapatan Hak dan Perizinan	976.814.639	-	100
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji		352.200	-
Jumlah Pendapatan Jasa	1.174.202.916	4.004.102	29.225

Pendapatan Negara Bukan Pajak berasal dari Pendapatan Sewa tanah bangunan dan Pendapatan Hak dan Perizinan yang berasal dari 5 % pendapatan kotor PANDI.

Beban Pegawai

D.2 Beban Pegawai

Rp. 25.498.995.824

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.25.498.995.824 dan Rp. 25.695.805.114. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Rincian Beban Pegawai TA 2018 dan TA 2017

URAIAN	REALISASI SEM II TA 2018	REALISASI TA 2017	NAIK (TURUN) %
Belanja gaji Pokok PNS	9.560.629.768	10.167.931.881	(5,97)
Belanja Pembulatan Gaji PNS	124.934	137.249	(8,97)
Belanja Tunj.Suami/Istri	703.235.820	713.997.050	(1,51)
Belanja Tunj.Anak	168.168.378	166.095.382	1,25
Belanja Tunj.Struktural	1.020.060.000	1.085.090.000	(5,99)
Belanja Tunj.Fungsional	128.570.000	67.790.000	89,66
Belanja Tunj.PPh PNS	40.988.430	83.403.622	(50,86)
Belanja Tunj.Beras PNS	449.510.940	484.127.700	(7,15)
Belanja Uang makan	1.044.014.000	1.082.243.000	(3,53)
Belanja Tunj.Umum PNS	255.630.000	271.175.000	(5,73)
Belanja gaji Pokok Non PNS	40.948.700	50.398.400	
Blanja tunjangan Pegawai non PNS	71.500.000	88.000.000	
Belanja tunjangan lainnya Non PNS	4.094.870	9.789.840	-
Bdlanja Pegawai			
(Tunjangan/kegiatan	12.011.519.984	11.425.625.990	
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah Belanja Neto	25.498.995.824	25.695.805.114	(0,77)

Beban Persediaan Rp. 1.971.673.260

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.1.971.673.260 dan 2.377.543.758.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Persediaan TA 2018 dan TA 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	1.971.673.260	2.377.543.758	(17,07)
Beban Persediaan Lainnya	-	169.950	
Jumlah Beban Persediaan	1.971.673.260	2.377.713.708	(17,08)

Beban Barang dan Jasa Rp. 80.341.533.990

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan jasa Tahun 2018 dan Tahun 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 80.341.533.990 dan Rp. 69.311.854.996.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2018 dan TA 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017	% Naik
Beban Keperluan Perkantoran	2.194.249.700	1.554.192.500	(TURUN) 41
Beban Penambah daya tahan tubuh	243.886.000	238.842.000	2
Beban pengiriman surat dinas pos pusat	1.900.000	28.000	6.686
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	2.851.807.200	2.491.970.500	14
Beban barang Operasional lainnya	5.045.049.071	154.221.100	3.171
Beban Bahan	4.627.720.760	8.536.455.410	(46)
Beban Honor Output Kegiatan	2.884.270.000	6.061.447.500	(52)
Beban barang Non Operasional Lainnya	914.662.750	363.107.500	152
Beban Langganan listrik	46.352.142	195.107.030	(76)
Beban jasa Pos dan Giro	11.665.934.760	•	#DIV/0!
Beban jasa konsultan	24.103.232.105	15.699.567.000	54
Beban Sewa	6.973.430.000	13.049.603.543	(47)
Beban Jasa profesi	18.782.581.022	10.179.907.500	85
Beban Jasa lainnya	6.458.480	10.787.405.413	(100)
Jumlah	80.341.533.990	69.311.854.996	16

Beban Pemeliharaan Rp. 1.847.306.720

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan Tahun 2018 dan 2017 adalah masingmasing sebesar Rp. 1.847.306.720 dan Rp. 1.574.247.249. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharan untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagaiberikut:

Perbandingan Rincian Beban Pemeliharaan TA 2018 dan TA

URAIAN	TH 2018	TH 2017	% Naik (TURUN)
Beban Pemeliharaan Gedung dan bangunan	152.790.000	60.154.300	154
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.250.562.298	1.318.873.829	(5)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	355.530.172	170.987.800	108
Beban Pemeliharaan Lainnya	80.550.000	14.465.000	-
Beban persediaan bahan untuk pemeliharaan	7.874.250	9.766.320	(19)
Jumlah	1.847.306.720	1.574.247.249	17

Beban Perjalanan Dinas Rp. 40.875.859.548

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.40.875.859.548 dan Rp. 37.546.140.420. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2018 dan 2017

			,
Jumlah	40.875.859.548	37.546.140.420	8,87
Beban perjalanan lainnya-Luar negri	3.678.842.433	2.908.998.401	
Beban Perajalan Biasa-Luar Negri	0	0	#DIV/0!
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	29.136.607.554	27.361.550.331	6,49
Kota	3.362.879.397	2.671.800.151	25,87
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	377.340.000	154.070.000	144,91
Beban Perjalanan Biasa	4.320.190.164	4.449.721.537	-2,91

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Rp. 1.724.537.800

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.1.724.537.800 dan Rp. 1.886.696.400

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Dalam hal ini, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika bertujuan untuk meningkatkan pemahaman/kemampuan masyarakat mengenai pemahaman/penggunan fasilitas komputer. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Maysarakat TA 2018 dan TA 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2016	NAIK (TURUN) %
Beban Barang dan Bantuan Lainnya yg memiliki karakteristik bantuan pemerintah	1.724.537.800	1.886.696.400	0,00
Beban Barang Fisik lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda	0		#DIV/0!
Beban Barang lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda	0		#DIV/0!
Beban Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat			#DIV/0!
Jumlah	1.724.537.800	1.886.696.400	-8,59

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp. 42.886.174.836 Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 42.886.174.836 dan Rp. 23.745.803.243. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2018 dan TA 2017

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2018	TH 2017	% Naik (TURUN)
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	36.077.551.224	23.001.020.947	57
Beban Amortisasi software	1.346.421.866	672.140.919	100
Beban amortisasi lisensi	5.441.673.746	-	#DIV/0!
Beban penyusutan aset tetap yg tidak digunakan dalam (operasional pemerintal	8.752.081	(100)
Bebas Amortisasi Aset Tak Berwujud Yang Tidak			
digunakan Dalam operasional Pemerintahan	528.000	63.889.296	(99)
Jumlah	42.866.174.836	23.745.803.243	81

Beban
Penyisihan
Piutang Tak
tertagih
Rp.191.435

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.191.435- dan Rp. 350.000. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih TA 2018 dan TA 2017

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2018	TH 2017	% Naik (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang lainnya	553.384	350.000	58
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang			
Lancar	(1.150.000)		
Jumlah	(596.616)	350.000	(270)

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp. 1.240.073.743

D.11 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiridari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.1.240.073.743 dan Rp.

3.122.315.880

Perbandingan Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2018 dan TA 2017

URAIAN	TH 2018	TH 2017
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	19.500.000	21.700.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	(3.616.685.179)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	1.240.901.643	545.647.200
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(20.327.900)	(72.977.901)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	1.240.073.743	(3.122.315.880)

Pos-Pos Luar Biasa D.12 POS-POS LUAR BIASA

Rp.-

Tidak ada Pos-Pos Luar Biasa pada Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika.

E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN **EKUITAS**

Ekuitas

Awal E.1 Ekuitas Awal

Rp. 191.742.332.810

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2018 sebesar Rp.191.742.332.810

Defisit LO Rp.

E.2 Defisit LO

192.711.208.703

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 2017 Desember 2018 dan adalah defisit sebesar Rp.192.711.208.703 dan Rp. 164.469.081.774. Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan

E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Kebijakan

Perubahan Kebijakan

Akuntansi/Kesalah

an Mendasar

Rp0

Transaksi Dampak Kumulatif Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0

E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp.0

E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.967.973.900 Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2017 adalah

sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp.0

E.3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp. (3.561.633.959)

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp. (3.561.633.959) dan Rp2.362.835.534 Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Tahun 2018

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi 2018	Nilai Koreksi 2017	NAIK (TURUN
Koreksi Nilai Aset tetap Non revaluasi	(78.781.833)	3.722.353.523	-102,12
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non revaluasi	(3.482.852.126)	1.758.868.155	-298,02
Jumlah	(3.561.633.959)	5.481.221.678	-164,98

Koreksi Lain lain Rp. 0

Lain- E.3.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2018

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi 2017	Nilai Koreksi 2016	NAIK (TURUN
Koreksi Lainnya		-	
Jumlah	-	-	

Transaksi Antar Entitas Rp. 137.011.197.573

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.137.011.197.573 dan Rp. 317.702.337.360. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	TA 2018	TA 2017	NAIK (TURU
Diterima dari Entitas Lain	(2.603.796.900)	(1.280.355.176)	103,37
Ditagihkan ke Entitas Lain	138.608.294.417	324.995.725.488	-57,35
Transfer Masuk	2.421.771.608	843.618.188	
Transfer Keluar	(1.415.071.552)	(7.095.164.607)	-80,06
Pengesahan Hibah Langsung	-	33.074.062.544	-100,00
Pengesahan Pengembalian		•	
Hibah Langsung			
Jumlah	137.011.197.573	350.537.886.437	-60,91

Diterima dari entitas lain sebesar

Rp.- (2.603.796.900)

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2018, DDEL sebesar Rp.(2.603.796.900) sedangkan DKEL sebesar Rp.138.608.294.417.

Transfer masuk Rp. 2.421.771.608

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer masuk 31 Desember 2018 sebesar Rp. 2.421.771.608 sedangkan transfer keluar sebesar Rp.(1.268.927.972)

Ekuitas Akhir Rp. 132.480.687.721

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.132.480.687.721 dan Rp. 194.708.382.534.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. KEJADIAN – KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian – kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Daftar temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana dalam lampiran.

F.3. INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

Daftar informasi belanja akrual disajikan sebagaimana dalam lampiran.

F.4. REKENING PEMERINTAH

Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika TA 2018 mempunyai rekening yang digunakan untuk menampung BA 059.04 adapun Nomor Rekening tersebut yaitu :

Nama Rekening : BPG 018 Ditjen Aplikasi Informatika

Nomor Rekening : 1210004341875

NPWP : 000.444.547.4-025.000

Bank : Mandiri Cabang Jakarta Kebon Sirih

F.5.PENGUNGKAPAN LAIN LAIN

- Terdapat kesalahan MAK,seharusnya menggunakan akun belanja 523111
 tapi realisasinya menggunakan akun 536111.
- Terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp.264.517.985 diakibatkan gangguan layanan
 /SLA sehingga Link Intenet Down